AdministrativA
Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Volume 5 (2) 2023: 163-168 E-ISSN: 2714-7673
administrativa.fisip.unila.ac.id

ARTICLE

Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)

Ike Fitti Wardani[1*], Dedy Hermawan[2], Ita Prihantika[3]

[1,2,3]Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Wardani, I.F, Hermawan, D., Prihantika, I., (2023) Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro). Administrativa 5(2)

Article History
Received: 14 September 2022
Accepted: 2 Mei 2023

Keywords:
Evaluation, MCH Program, Department of Population and Civil Registration.

ABSTRACT
Implementation of the MCH program in Metro City has been going well, as evidenced by the achievement data on MCH ownership in 2022, only 1,411 children do not have MCH from the total number of children in Metro City aged 0-17 years less a day of 52,648 or means there are 51,237 children who already have MCH. This data also shows that the implementation of the MCH program in Metro City by the Disdukcapil of Metro City has passed the target set in the center, which is 45,629. However, related to the use of MCH in Metro City, it cannot be used optimally, such as MCH has not been made one of the mandatory requirements in school registration, MCH has also not been fully used in tourist attractions designated as one of the locations for MCH utilization or other benefits.

Kata Kunci:
Evaluasi. Program KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ABSTRAK
Penyelenggaraan program KIA di Kota Metro telah berjalan dengan baik terbukti dengan data capaian kepemilikan KIA tahun 2022, hanya 1.411 anak yang belum memiliki KIA dari jumlah seluruh anak di Kota Metro usia 0-17 tahun kurang sehari sebesar 52.648 atau berarti ada 51.237 anak yang sudah memiliki KIA. Dengan data tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIA di Kota Metro oleh Disdukcapil Kota Metro telah melewati target yang ditentukan oleh pusat yaitu sebesar 45.629. Namun terkait dengan pemanfaatan KIA di Kota Metro memang belum dapat digunakan secara maksimal, yaitu seperti KIA belum dijadikan salah satu syarat wajib dalam pendaftaran sekolah, KIA juga belum sepenuhnya dapat digunakan ditempat-tempat wisata yang ditunjuk sebagai salah satu lokasi pemanfaatan KIA atau manfaat-manfaat lainnya. Oleh karena itu guna memaksimalkan manfaat dari program KIA ini Disdukcapil Kota Metro perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak yang dipilih dalam bekerja sama.

A. PENDAHULUAN

Tingkat penduduk yang tinggi membuat pemerintah harus dapat mendata masyarakat secara teliti dan memberikan sebuah dokumen sebagai tanda administrasi bagi penduduk Indonesia. Penyediaan dokumen tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pemenuhan kewajiban untuk

* Corresponding Author
Email : ikefittiw10@gmail.com

© 2023 Author(s), Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat maka pemerintah melalui instansi terkait berupaya membuat tertib administrasi secara nasional yang pemberian tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebagai bagian dari pemerintah Disdukcapil memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan memastikan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pengadministrasian berjalan dengan baik. Dokumen kependudukan yang saat ini telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia diantaranya ialah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan sebagainya. E-KTP sendiri biasanya hanya dimiliki oleh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas. Karena penduduk Indonesia bukan hanya terdiri dari masyarakat yang telah berusia 17 tahun keatas namun terdapat penduduk yang usia nya dibawah 17 tahun, pemerintah merasa perlu memberikan tanda administrasi untuk anak dibawah usia 17 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan dan melindungi hak anak. Hal ini diterapkan melalui Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan penerbitan KIA karena Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya Akte Kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status, keabsahan legalitas dan kewarganegaraan kepada anak. KIA merupakan bukti identitas resmi untuk anak di bawah umur 17 tahun dan belum menikah yang memiliki peran seperti halnya KTP bagi orang dewasa. Untuk penerbitan Kartu Identitas Anak ini sama halnya juga dengan penerbitan KTP yaitu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota.

Kota Metro menjadi salah satu kabupaten/kota yang melaksanakan program tersebut. Namun di dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya mengenai prosedur pelayanan terkait dengan kelengkapan persyaratan yang disediakan oleh orang tua anak untuk mengurus pembuatan KIA di Disdukcapil Kota Metro dinilai kaku sehingga menyulitkan pemohon yang ingin mengurus penerbitan KIA. Hal tersebut ditunjukkan oleh tidak dapat dilayaninya penerbitan KIA apabila pemohon tidak membawa e-KTP asli dari orang tua atau wali terkait. pemanfaatan KIA untuk anak yang masih perlu dilakukan peningkatan secara berkala, karena sejauh ini hanya dapat digunakan untuk pendaftaran sekolah dan mendapatkan diskon di taman bermain yang ada di Kota Metro serta belum memenuhi kebutuhan anak lainnya seperti kenyamanan saat bersosialisasi, terhindar dari kekerasan dimanapun dan oleh siapapun. Belum maksimalnya penyelenggaraan program KIA yang sasaran programnya ialah anak-anak usia 0-17 tahun membuat kegunaan dari program tersebut tidak dapat terlihat dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan evaluasi guna mengetahui apa kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh stakeholders dalam penerapan program tersebut serta untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada tahapan dalam evaluasi program KIA di Kota Metro dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2008) yaitu :

1 Efektivitas, bersangkutan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai sasaran dari diadakannya tindakan.

2 Perataan, dalam suatu kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh dari sasaran suatu kebijakan publik.
3 Responsivitas, dalam suatu kebijakan publik responsitivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tenggapan sasaran kebijakan publik dari kebijakan yang telah diterapkan.
4 Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Metro

Sedangkan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi kegiatan dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan ialah perpanjangan pengamatan, triangulasi dan kebergantungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Metro (sudi pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Metro). Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ingin ditemukan jawabannya, maka hasil penelitian tersebut diuraikan dengan fokus tersebut.

Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KIA di Kota Metro telah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Metro seperti melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan melakukan penjemputan berkas untuk dilakukan registrasi pembuatan KIA. Selain itu Disdukcapil Kota Metro juga meluncurkan aplikasi "Layanan Disdukcapil Dalam Genggaman" dimana aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Disdukcapil Kota Metro termasuk pembuatan KIA. Dan untuk memaksimalkan kegunaan KIA, Disdukcapil Kota Metro melakukan kerjasama dengan beberapa tempat selain sekolah-sekolah di Kota Metro yaitu seperti rumah sakit, tempat rekreasi dan beberapa toko makanan di Kota Metro.

Perataan

Program KIA di Kota Metro oleh Disdukcapil Kota Metro telah mencapai target atau melebihi target dimana target wajib yang ditentukan oleh pemerintah pusat sebesar 45.629 sedangkan registrasi KIA yang telah dilakukan mencapai 51.237 atau telah melebihi 100% lebih tepatnya 112,29% dari jumlah anak di Kota Metro yaitu 52.648 dan berarti kurang lebih 1.411 anak yang belum memiliki KIA. Hal ini dilihat dari hasil dokumentasi oleh peneliti tentang data jumlah pencapaian registrasi KIA di Kota Metro terhitung sampai pada tanggal 20 Januari 2022. Yang berarti dapat dikatakan telah merata dalam pelaksanaan program tersebut, namun tetap perlu dilakukan peningkatan agar sisa anak yang belum memiliki KIA dapat terpenuhi juga haknya.

Responsivitas

Respon masyarakat Kota Metro tentang program ini awalnya kurang begitu baik karena belum memahami secara jelas kegunaannya. Setelah masyarakat mengetahui sedikit banyak kegunaan, respon masyarakat menjadi lebih dapat menerima. Namun para wali murid menginginkan tetap diadakannya sosialisasi yang diselenggarakan langsung oleh Disdukcapil agar kegunaan dari KIA ini dapat dipahami terkhusus para wali murid.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program KIA oleh Disdukcapil Kota Metro

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program KIA di Kota Metro yaitu :

1. Belum maksimalnya hubungan komunikasi antara Disdukcapil Kota Metro dengan sekolah-sekolah yang menjadi target program tersebut. Hal ini membuat ketidaksamaan pemahaman tentang kegunaan KIA sebagai salah satu persyaratan daftar sekolah. Disdukcapil Kota Metro menjelaskan bahwa KIA menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran sekolah, sedangkan pihak sekolah tetap dapat menerima siswa baru tanpa KIA. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil Kota Metro kepada sekolah maupun wali murid.
2. Faktor penghambat selanjutnya ialah belum adanya kegiatan pengecekan ulang secara rutin yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Metro dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data antara data tertulis dengan data yang ada di lapangan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen kependudukan untuk anak yaitu KIA. Selain itu belum adanya sanksi untuk hal tersebut membuat masyarakat merasa bahwa tidak memiliki KIA bukan suatu masalah.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program KIA di Kota Metro oleh Disdukcapil Kota Metro maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setelah melakukan evaluasi dengan menggunakan beberapa indikator evaluasi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program KIA di Kota Metro telah berjalan dengan baik terbukti dengan data capaian kepemilikan KIA tahun 2022, hanya 1.411 anak yang belum memiliki KIA dari jumlah seluruh anak di Kota Metro usia 0-17 tahun kurang sehari sebesar 52.648 atau berarti ada 51.237 anak yang sudah memiliki KIA. Dengan data tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIA di Kota Metro oleh Disdukcapil Kota Metro telah melewati target yang ditentukan oleh pusat yaitu sebesar 45.629. Namun terkait dengan pemanfaatan KIA di Kota Metro memang belum dapat digunakan secara maksimal, yaitu seperti KIA belum dijadikan salah satu syarat wajib dalam pendaftaran sekolah, KIA juga belum sepenuhnya dapat digunakan ditempat-tempat wisata yang ditunjuk sebagai salah satu lokasi pemanfaatan KIA atau manfaat-manfaat lainnya. Oleh karena itu guna memaksimalkan manfaat dari program KIA ini Disdukcapil Kota Metro perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak yang dipilih dalam bekerja sama.

2 Adapun faktor penghambat pada pelaksanaan Program KIA di Kota Metro yaitu pengumpulan persyaratan KIA oleh sekolah yang dilakukan secara kolektif masih sering belum lengkap karena telat dipersiapkan oleh siswa-siswi. Selain itu komunikasi antara Disdukcapil Kota Metro dengan pihak-pihak yang terlibat juga belum dilakukan secara intens, belum adanya jadwal pengecekan ulang tentang data tertulis dengan data di lapangan juga membuat data yang disajikan terkadang tidak sinkron. Dan faktor penghambat yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat untuk melakukan registrasi KIA masih perlu ditingkatkan.

Saran

Adapun beberapa saran yang perlu disampaikan oleh peneliti yaitu :

1 Perlu adanya tenggang waktu yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Metro kepada sekolah-sekolah yang bekerjasama dalam pengumpulan persyaratan KIA agar tidak banyak membuang waktu.
2 Perlu adanya sosialisasi terkait aplikasi "Layanan Disdukcapil Dalam Genggaman" yang dibuat oleh Disdukcapil Kota Metro kepada masyarakat terutama wali murid secara lebih jelas agar masyarakat dapat benar-benar paham secara keseluruhan tentang Program KIA ini yang secara tidak langsung juga dapat mengubah respon dari masyarakat serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wali murid.
3 Perlu diadakannya pertemuan yang lebih terjadwal dengan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Metro dalam penyelenggaraan Program KIA guna berkoordinasi sejauh mana manfaat dari program ini berjalan.
4 Perlu adanya jadwal monitoring untuk menyesuaikan data tertulis dengan data di lapangan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Metro agar tidak adanya perbedaan data sehingga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat atau pengguna data.

REFERENSI

Afifudin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia.

Akbar, Muhammad Firyal. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 47-64.

Dewi, Agustini. (2017). Evaluasi Program Internet Gratis di Kabupaten Lampung Utara dalam Mendukung Literasi Publik. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Dunn, William N. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fatra Donna, H. (2018). Evaluasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Herdiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jaka, Permana. (2018). Evaluasi Progam Kartu Identitas Anak di Kota Cilegon Tahun 2018. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Cilegon.

Lica, Chintya. (2017). Evaluasi Pembinaan SPM Polda Lampung (Studi Pada Anggota POLRI Yang Bermasalah). *Tesis*. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ramdhani, Abdullah. & Ramdhani, Muhammad Ali. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

Steers, Richard M. (2012). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tresiana, Novita. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Tresiana, Novita. (2017). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.